



POLICY BRIEF

Strategi Komunikasi dan Diseminasi
Aspek Keberlanjutan Minyak Sawit dan
Kebun Sawit di Dunia Internasional

Penulis

Dodik Ridho Nurrochmat, Meti Ekayani, Suria Darma Tarigan,
Bart W. van Assen, Mudrika Qanita, Arif Satria

RINGKASAN

Industri sawit berperan besar dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan berkontribusi signifikan dalam pencapaian SDGs. Minyak sawit merupakan sumber minyak nabati terpenting dan paling efisien dalam penggunaan lahan di dunia. Permintaan dan harga minyak nabati dunia terus meningkat, perkembangan produksi minyak sawit harus didorong untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan untuk minyak nabati dunia. Perluasan lahan perkebunan sawit tetap diperlukan, namun harus diarahkan untuk pemanfaatan lahan tidak produktif, kawasan non-hutan, dan rehabilitasi kawasan hutan terdegradasi. Peta jalan sawit keberlanjutan harus memerhatikan kepentingan ekologi, paralel dengan penyediaan lahan untuk kepentingan sosial dan ekonomi.

KATA KUNCI

- ✓ Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, menghasilkan sekitar setengah dari total produksi global. Industri sawit selaras dengan SDGs dan berperan besar menggerakkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan industri.
- ✓ Permintaan minyak nabati dunia terus meningkat. Minyak sawit berkontribusi besar dalam pasokan minyak nabati dunia dan paling efisien dalam penggunaan lahan.
- ✓ Untuk memenuhi target melipatgandakan produksi minyak sawit pada tahun 2045, diperlukan perluasan lahan untuk ekspansi kebun sawit. Skenario business-as-usual mengasumsikan diperlukan tambahan sekitar 16,5 juta hektar lahan untuk memenuhi target ganda produksi CPO pada tahun 2045 yang dikhawatirkan memicu deforestasi.
- ✓ Kebijakan reforma agraria, moratorium penghentian izin baru perkebunan sawit dan dinamika harga sawit di pasar dunia adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola dan perluasan kebun sawit.

REKOMENDASI

- ✓ Dukungan terhadap pengembangan perkebunan dan industri sawit harus dilakukan multipihak secara terintegrasi karena berkontribusi besar tidak hanya terhadap pembangunan nasional, tetapi juga pencapaian SDGs di tingkat global. Pemerintah harus memimpin orkestrasi dukungan terhadap sawit berkelanjutan.
- ✓ Izin baru perkebunan sawit, terutama perluasan kebun sawit rakyat adalah ke-niscayaan untuk memenuhi target produksi sawit nasional dan memenuhi permintaan minyak nabati dunia yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan lahan.
- ✓ Target produksi sawit hendaknya tidak hanya dipenuhi melalui izin baru dan perluasan kebun sawit (ekstensifikasi), tetapi juga dengan upaya peningkatan produktivitas (intensifikasi) sehingga kekhawatiran memicu deforestasi tidak terjadi.
- ✓ Evaluasi secara berkala kebijakan reforma agraria, moratorium penghentian izin baru perkebunan sawit dan dinamika harga sawit sangat diperlukan untuk menjaga arah pengembangan sawit yang mendukung kepentingan nasional, dengan memerhatikan isu internasional.



PENDAHULUAN

Peta jalan pengembangan minyak nabati, khususnya minyak sawit, perlu segera disiapkan melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi produk pangan, oleokimia, dan biofuel, ekosistem tata kelola, kapasitas SDM, dan teknologi. Dengan luas lahan 10% dari total cadangan lahan global untuk minyak nabati, Indonesia mampu menjadi negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan 40% dari total *oleo-mix* yang sangat penting dalam ketahanan pangan (OEC, 2023).

Terdapat tiga aspek kunci dalam pembangunan sawit berkelanjutan. Kategori pertama berkaitan dengan aspek produksi yaitu hasil dan produktivitas. Saat ini, total produksi CPO di Indonesia adalah 50 ton CPO/tahun. Melalui strategi jalur ganda Intensifikasi dan ekstensifikasi, Indonesia diharapkan dapat memenuhi target 100 ton CPO/tahun pada tahun 2045.

Penerapan Teknologi Informasi seperti aplikasi *Preci-palm*, *Good Agricultural Practices* (GAP), dan kolaborasi antar pemangku kepentingan akan meningkatkan produktivitas perkebunan sawit, khususnya petani sawit dari 4 ton CPO/ha/tahun menjadi 7,5 ton CPO/ha/tahun di 2045. Kurang dari 50% petani setuju mengikuti program peremajaan sawit. Pengembangan model zonasi peremajaan kebun dan identifikasi kebutuhan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi petani dalam program peremajaan kebun. Demikian halnya dengan pengolahan limbah batang kelapa sawit untuk bahan baku industri.



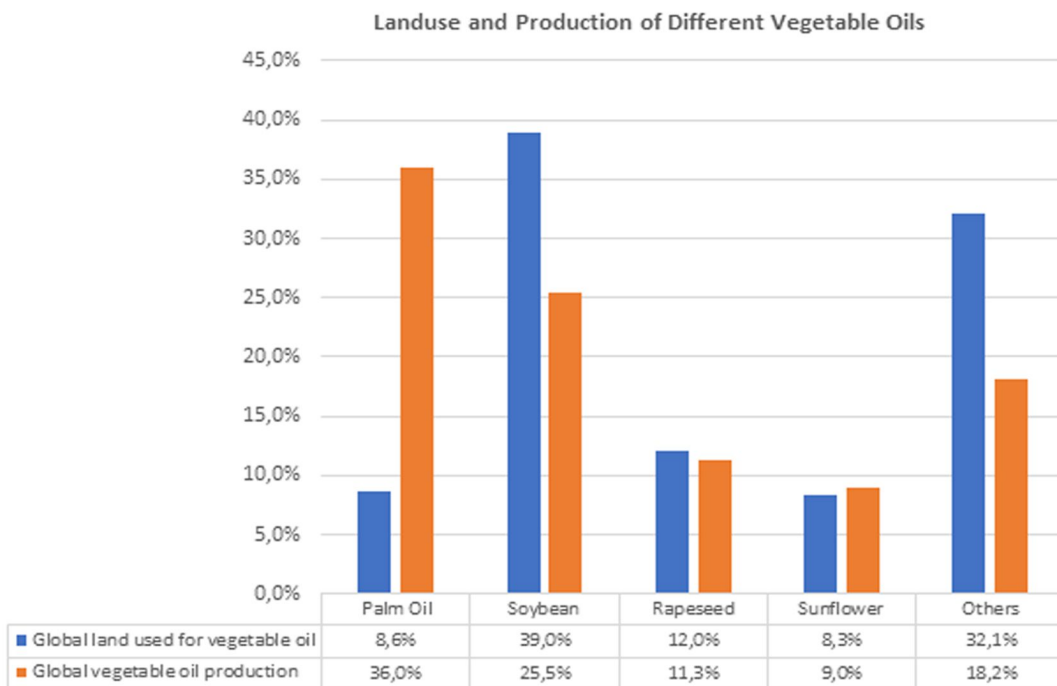
MINYAK SAWIT SEBAGAI SOLUSI KRISIS EKOLOGI DAN EKONOMI DUNIA

Minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dalam penggunaan lahan di dunia. Tanaman sawit hanya menggunakan sekitar 8,6% lahan, tetapi berkontribusi terhadap 36% produksi minyak nabati global (Gambar 1). Pertumbuhan pasar minyak nabati sampai tahun 2030 diperkirakan sebesar 4,6% per tahun, sementara nilai pasar minyak nabati tumbuh sebesar 9,3% per tahun (Gambar 2).

Gambar 2 menunjukkan bahwa permintaan minyak nabati masih terus tumbuh dengan pertumbuhan nilai yang jauh lebih tinggi dari permintaan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa minyak nabati adalah komoditas yang sangat menarik secara ekonomi, dan setiap negara penghasil minyak nabati pasti akan berupaya merebut pangsa pasar untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Persoalannya, apabila aspek keberlanjutan dipertimbangkan, maka ekspansi penanaman minyak nabati tentu harus difokuskan pada minyak nabati dengan produktivitas terbesar dan paling efisien dalam penggunaan lahan.

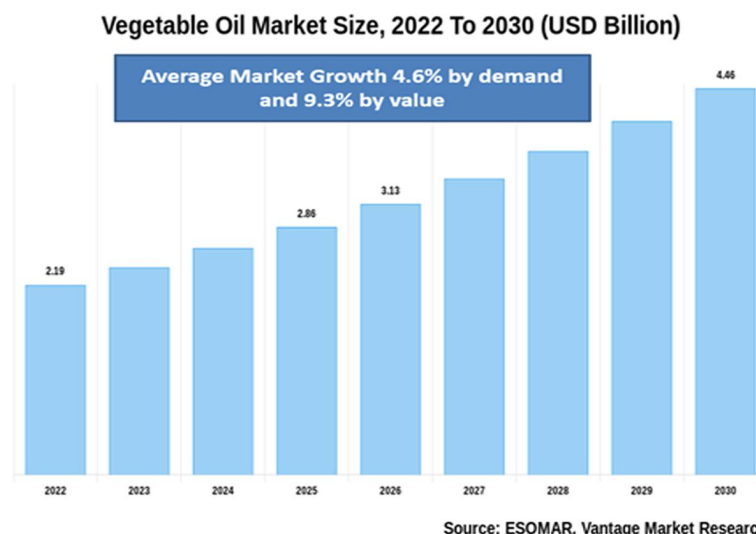
Hal ini sangat penting menjadi pertimbangan karena dengan memilih produk yang paling produktif dan efisien dalam penggunaan lahan, maka konversi lahan untuk pemenuhan permintaan minyak nabati global akan minimal. Dengan logika ini, maka kebijakan moratorium izin baru kebun sawit justru berpotensi menyebabkan peningkatan konversi lahan dan deforestasi global, karena permintaan minyak nabati akan diisi oleh minyak non-sawit yang produktivitasnya jauh lebih rendah dan memerlukan lahan yang jauh lebih besar untuk perluasan penanaman.

Untuk memenuhi permintaan minyak nabati dunia, maka untuk menjamin keberlanjutan dan meminimalkan konversi lahan maka perluasan dan intensifikasi kebun sawit diperlukan agar minyak nabati dunia sedapat mungkin dipenuhi dari tanaman yang paling produktif dan efisien dalam penggunaan lahan.



Sumber: FAO dalam OurWorldinData (2021), diolah

Gambar 1. Produksi dan Efisiensi Penggunaan Lahan Minyak Nabati Dunia



Gambar 2. Estimasi Pertumbuhan Pasar Minyak Nabati Dunia 2022-2030

KEBIJAKAN PEMUNGKIN PENGARUSUTAMAAN SAWIT BERKELANJUTAN

Luas kebun kelapa sawit di Indonesia saat ini 16,38 juta ha. Untuk memenuhi target produksi CPO 100 juta ton pada 2045 tanpa meningkatkan produktivitas dibutuhkan 33 juta ha. Dengan asumsi produktivitas rata-rata meningkat 50%, diperkirakan untuk memenuhi target 100 juta ton CPO pada 2045, hanya dibutuhkan 25 juta ha perkebunan kelapa sawit, bukan 33 juta ha. Sekitar 3 juta ha kelapa sawit telah ditanam di kawasan hutan (keterlanjuran). Kedepannya, perluasan kelapa sawit harus ditanam di lahan kosong dan tidak berhutan. Pengayaan minimal 30% penanaman pohon di perkebunan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan (mempromosikan agroforestri berbasis kelapa sawit) akan meningkatkan fungsi ekologi kebun sawit. Tukar guling lahan berhutan dan tidak berhutan adalah salah satu kebijakan pemungkin yang direkomendasikan untuk menghindari deforestasi lebih lanjut (Nurrochmat *et al.* 2020). (Tabel 1).



Tabel 1 Aspek Kunci dan Kebijakan Pemungkin Peta Jalan Sawit Berkelanjutan

Aspek Kunci	Tahun 2022	Kebijakan Pemungkin	Aksi	Target 2045	Catatan
Lahan kelapa sawit	16,38 juta ha	Peningkatan produktivitas lahan kelapa sawit untuk meminimalkan perluasan lahan	Penyediaan lahan yang sesuai untuk memenuhi target produksi CPO. Lahan harus diambil dari lahan non-hutan dan diprioritaskan untuk petani kecil	25 juta ha	Untuk memenuhi target produksi CPO 100 ton tahun 2045 perlu 33 juta ha kebun sawit. Produktivitas naik 50% akan memenuhi target dengan 25 juta ha
Kelapa sawit ditanam di kawasan hutan (keterlanjuran)	Sekitar 3 jt ha	Agroforestri berbasis kelapa sawit (tutupan pohon min. 30%)	Kebijakan tukar menukar lahan non-hutan di kawasan hutan dan lahan berhutan di APL dan Perhutanan Sosial	0	Agroforestri sawit dan kebijakan <i>landswap</i> direkomendasikan untuk menghindari deforestasi
Agroforestri berbasis kelapa sawit	Kurang dari 1%	Mempromosikan manfaat Agroforestri berbasis sawit	Kebijakan <i>zero deforestation</i> diterapkan melalui <i>landswap</i> dan agroforestri berbasis kelapa sawit	Sekitar 40%	Agroforestri sawit menjembatani kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologi
Keuntungan finansial kebun sawit & lahan hutan	Rp 30-40 juta/ha	Keuntungan finansial dapat dicapai dari hasil agroforestri	Mempromosikan tanaman sela bernilai komersial tinggi dalam agroforestri berbasis kelapa sawit	Rp 150-400 juta/ha	Sistem agroforestri terbukti meningkatkan keuntungan finansial petani di beberapa daerah
Penyerapan karbon per ha	Sekitar 40 ton/ha	Meningkatkan penyerapan karbon pada pola agroforestri sawit	Mempromosikan pohon bernilai komersial tinggi sebagai tanaman sela dalam agroforestri sawit	Sekitar 80 ton/ha	Menanam pohon komersial di agroforestri sawit meningkatkan penyerapan karbon



Meskipun menjanjikan keuntungan yang jauh lebih tinggi, agroforestri berbasis kelapa sawit belum lazim dilakukan di Indonesia. Kurang dari 1% petani kecil yang diperkirakan telah mempraktikkan agroforestri berbasis kelapa sawit. Ke depan, Agroforestri berbasis kelapa sawit diharapkan dapat dipraktikkan oleh lebih banyak petani kecil. Melakukan promosi besar-besaran tentang manfaat agroforestri berbasis kelapa sawit adalah penting. Agroforestri berbasis kelapa sawit juga dapat berpotensi menyelesaikan konflik lahan karena adanya kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan (keterlanjuran). Peningkatan keuntungan finansial dapat dicapai dengan hasil agroforestri. Mengembangkan tanaman atau pohon komersial dalam sistem agroforestri secara signifikan berpotensi meningkatkan keuntungan finansial tahunan dari pengelolaan hutan dan lahan pertanian.

Ada beberapa skema penggunaan lahan secara efektif untuk mendukung sawit berkelanjutan. Pertama, tukar guling dalam skema reforma agraria (landswap) untuk penyediaan lahan sawit tanpa deforestasi. Kedua, revisi fungsi kawasan hutan dan lahan hutan terdegradasi dalam Eencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Ketiga, intensifikasi kebun sawit untuk semakin meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan.

Pada tingkat implementasi, terdapat beberapa faktor kunci dalam peta jalan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan:

- ✓ Mengurangi dampak negatif industri kelapa sawit melalui penerapan praktik kelapa sawit berkelanjutan dan pengembangan inovasi teknologi yang ramah lingkungan.
- ✓ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di industri kelapa sawit, termasuk melalui pelaporan yang tepat dan akses informasi yang lebih baik kepada publik.
- ✓ Melaksanakan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan untuk memastikan bahwa produksi minyak sawit dilakukan dengan praktik-praktik berkelanjutan.
- ✓ Meningkatkan penegakan hukum melalui pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa perusahaan kelapa sawit mengikuti peraturan dan mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan
- ✓ Memperkuat kerjasama antara pemerintah dan pemangku kepentingan di industri kelapa sawit untuk memastikan produksi minyak sawit berkelanjutan.
- ✓ Mendorong penggunaan IT untuk zonasi program peremajaan perkebunan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit.





REFERENSI

Nurrochmat DR, Boer R, Ardiansyah M, Immanuel G, Purwawangsa H. 2020. Policy forum: Reconciling palm oil targets and reduced deforestation: Landswap and agrarian reform in Indonesia. Forest Policy and Economics, Volume 119, October 2020, 102291. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102291>

OurworldinData, 2023. Palm Oil. Explore palm oil production across the world, and its impacts on the environment. <https://ourworldindata.org/palm-oil> (diunduh 18/12/2023)

Vantage Market Research, 2023. Reports. Vegetable Oil Market Size USD 4.46 Billion by 2030 (vantagemarketresearch.com)